



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT DETEKSI ANCAMAN
DEPUTI BIDANG IDENTIFIKASI DAN DETEKSI
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TENTANG
DETEKSI SERANGAN SIBER BERUPA PEMANFAATAN PERANGKAT HONEYPOT

Nomor : 63/PK/2020

Nomor : PERJ.42/BSSN/D1/PP.01.07/04/2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (07-04-2020) di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. BUDI ACHMAD DJOHARI** : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. SULISTYO** : Direktur Deteksi Ancaman, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Raya Muchtar No. 70, Bojongsari Lama, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16516, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan system informasi dan layanan data, serta pengelolaan, jaringan, dan komunikasi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Direktorat Deteksi Ancaman, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Badan Siber dan Sandi Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang identifikasi potensi dan deteksi ancaman.

Kemudian **PARA PIHAK** menerangkan bahwa untuk mendeteksi serta melacak serangan-serangan terhadap keamanan informasi diperlukan kerja sama Bidang Deteksi Serangan Siber Berupa Pemanfaatan Perangkat *Honeypot*.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Deteksi Serangan Siber Berupa Pemanfaatan Perangkat *Honeypot* dan dinyatakan bersifat RAHASIA bagi **PARA PIHAK** selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. *Honeypot* merupakan sebuah perangkat yang dipasang pada infrastruktur jaringan untuk tujuan mendeteksi serta melacak serangan-serangan terhadap keamanan informasi.
2. Perangkat *Honeypot* adalah sebuah perangkat milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan diruang server **PIHAK KESATU** dipergunakan sebagai peralatan dalam rangka mendeteksi dan melacak serangan-serangan terhadap keamanan informasi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Deteksi Serangan Siber Berupa Pemanfaatan Perangkat *Honeypot* di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemanfaatan Perangkat *Honeypot* milik **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan untuk mendeteksi serta melacak serangan-serangan terhadap keamanan informasi pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pemasangan Perangkat *Honeypot*;
- b. pemanfaatan Perangkat *Honeypot* yang digunakan untuk mendeteksi serta melacak serangan-serangan terhadap keamanan informasi; dan
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Perangkat *Honeypot*.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Perangkat *Honeypot*;
 - b. menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan Perangkat *Honeypot*;
 - c. memberikan laporan kepada **PIHAK KEDUA** terkait kondisi Perangkat *Honeypot* jika terjadi permasalahan pada perangkat *Honeypot*;
 - d. menerapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait Perangkat *Honeypot* yang disusun oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. mengikuti saran dan rekomendasi **PIHAK KEDUA** terkait prosedur pemanfaatan Perangkat *Honeypot*;
 - f. menjaga kerahasiaan bahwa telah dilakukan pemanfaatan Perangkat *Honeypot* di lingkungan **PIHAK KESATU** terhadap pihak lain yang tidak berkepentingan; dan

- g. membuat Berita Acara Kehilangan Perangkat Perangkat *Honeypot* dan bersedia dilakukan penyelidikan jika terjadi kehilangan Perangkat Perangkat *Honeypot* yang disebabkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. melakukan asistensi dan konsultasi terkait pemanfaatan Perangkat *Honeypot*;
 - b. menyediakan dan melakukan pemasangan Perangkat *Honeypot*;
 - c. memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan pada Pemanfaatan Perangkat *Honeypot*;
 - d. memberikan laporan secara berkala terkait pemanfaatan Perangkat *Honeypot* kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. memberikan *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait Perangkat *Honeypot* ke **PIHAK KESATU**;
 - f. menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Perangkat *Honeypot* **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. menerima pemasangan Perangkat *Honeypot* dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan laporan terkait pemanfaatan Perangkat *Honeypot* dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan bimbingan teknis, asistensi dan konsultasi terkait peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Perangkat *Honeypot*;
 - d. mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan pada Pemanfaatan Perangkat *Honeypot*;
 - e. menerima *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait Perangkat *Honeypot* kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. mendapatkan data yang dibutuhkan dalam rangka pemanfaatan Perangkat *Honeypot*;
 - b. mendapatkan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemasangan Perangkat *Honeypot*;
 - c. menggunakan informasi agregat hasil pemanfaatan Perangkat *Honeypot* berdasarkan prinsip anonimitas;

- d. menarik Perangkat *Honeypot* dari **PIHAK KESATU** apabila dalam pemanfaatannya menyalahi SOP yang diberikan atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama inikecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110
Telp : (021) 23529000
Email : www.mkri.id

b. **PIHAK KEDUA**

**Direktorat Deteksi Ancaman, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi,
Badan Siber dan Sandi Negara**

Jalan Raya Muchtar No. 70, Bojongsari Lama, Kec. Bojongsari, Kota Depok,
Jawa Barat 16516
E-mail : tu.d14@bssn.go.id

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


SULISTYO

PIHAK KESATU


BUDI ACHMAD DJOHARI